

## ABSTRAK

**Agnesa Nuryan:** *Analisis Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 Tahun 2017 tentang Pembatalan Hibah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara hibah. Ketentuan Hibah berdasarkan Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya Pasal 211 menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pada tanggal 8 Januari 2009 Tn. Tabrani Rab membuat surat wasiat berisikan hibah yang melebihi dari 1/3 harta benda miliknya, kepada dua orang anak kandungnya bernama Susiana Angraini Tabrani dan Ivan Tabrani, tanpa sepengetahuan anak kandungnya yang lain bernama Diana Tabrani dan Irma Tabrani, hingga menimbulkan sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara, untuk mengetahui fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 558 K/Ag/2017, serta penerapan hukum formil dan materiil yang digunakan majelis hakim pada tingkat kasasi dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, selain harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam hal ini adalah analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 tentang pembatalan hibah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi atau pengumpulan data, serta pustaka atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat banding tersebut, dilatarbelakangi oleh kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 558 K/Ag/2017 memutus dengan amar mengabulkan gugatan para penggugat sekaligus membatalkan surat wasiat berisikan hibah yang dibuat oleh pewasiat atau penghibah. Mahkamah Agung menerapkan hukum formil dan materiil yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
4. Pasal 194-195 Kompilasi Hukum Islam.
5. Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 9, dan surat al-Baqarah ayat 182.